PENGARUH SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PARTISIPASI ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN

TERHADAP KINERJA SKPD PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Skripsi Oleh

WAHYU RAKHMAD KURNIAWAN

01031281419116

Akuntansi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PARTISIPASI ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA SKPD PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Disusun Oleh :

Nama	: Wahyu R Kurniawan
NIM	: *01031281419116*
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan	Dosen Pembimbing
Tanggal:12Maret 2019	**Drs. Burhanuddin, M. Acc., Ak** **NIP. 19580828 198810 1 001**
Tanggal: 24 September 2018	**Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak** **NIP. 19640903 199403 2 001**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PARTISIPASI ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA SKPD PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Disusun Oleh :

Nama : Wahyu Rakhmad Kurniawan
NIM : 01031281419116
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 27 Maret 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 27 Maret 2019

Ketua

Drs. Burhanuddin, M. Acc., Ak
NIP. 19580828 1988101 001

Penguji

Dr. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19770417 201012 2 001

Anggota

Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak.,CA
NIP. 19640903 199403 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Wahyu Rakhmad Kurniawan
NIM	: 01031281419116
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kota Palembang

Pembimbing:

Ketua	: Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak
Anggota	: Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
Anggota	: Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak

Tanggal Ujian : 27 Maret 2019

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 28 Maret 2019

Yang membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

DB691AFF481012390

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Wahyu R Kurniawan

NIM. 01031281419116

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***"You never known how strong you are, until being strong is only your choice "*(Papa)**

"I'm the best, its not a arrogance but a belief". (Willie Waka)

Persembahan

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

- Papa dan Mama
- Saudara-saudariku
- Orang-orang yang aku sayangi
- Orang-orang yang menyayangiku
- Almamterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang **berjudul "Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kota Palembang".**Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh*sinkronisasi perencanaan, partisipasi anggaran, d*an, *kejelasan sasaran anggaran*terhadap kinerja SKPD di kota Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa dinantikan dengan tangan terbuka. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan bahan masukan akademis bagi peneliti selanjutnya dan berbagai pihak lainnya.

Palembang, 28 maret 2019

Penulis

Wahyu R Kurniawan

SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama	: Wahyu Rakhmad Kurniawan
NIM	: 01031281419116
Jurusan	: Akuntansi
Mata Kuliah	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	: Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kota Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, *grammer*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 28 Maret 2019

Pembimbing Skripsi:

Ketua	Anggota
Drs. Burhanuddin, M. Acc., Ak	Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19580828 1988101 001	NIP. 19640903 199403 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRAK

PENGARUH SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PARTISIPASI ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA SKPD PEMERNTAH KOTA PALEMBANG

Oleh :

Wahyu Rakhmad Kurniawan;
Drs. Burhanuddin, M. Acc., Ak
Hj. Rochmawat Daud, S.E., M.Si., Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, parsipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran* terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode sensus, jumlah responden ada 45 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang berisi 30 pernyataan. Selanjutnya data dianalisis menggunkan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja SKPD (2) sinkronisasi perencanaan berpengaruh terhadap kinerja SKPD (3) partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD (4) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Kata Kunci : Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Kinerja SKPD.

Ketua	Anggota
Drs. Burhanuddin, M. Acc., Ak	Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19580828 1988101 001	NIP. 19640903 199403 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

PENGARUH SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PARTISIPASI ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA SKPD PEMERNTAH KOTA PALEMBANG

By :

Wahyu Rakhmad Kurniawan;
Drs. Burhanuddin, M. Acc., Ak
Hj Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak

This study aims to analyze the influence of planning and budgeting synchronization, budgetary participation and budget goal clarity on the performance of local government agencies in palembang. This study employed the quantitative approach. By applying census method, its respondents are 45 person. The data collection is done directly by using a questionnaire contains 30 statements. Then the multiple regression analysis model apply to test the hypotheses. The result indicate that (1) the planning and budgeting synchronization, budget participation, and budget goal clarity affect the SKPD performance simultaneously (2) planning and bugeting synchronization affect SKPD Performance (3) budget participation affect SKPD performance, and (4) budget goal clarity affect SKPD performance.

Keywords: ***Planning and budgetary synchronization, Budgetary Partisipation, Budget Local Goal Clarity, Local Government Agencies (SKPD) Performance.***

First Advisor	*Members*
Drs. Burhanuddin, M. Acc., Ak	Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19580828 1988101 001	NIP. 19640903 199403 2 001

Acknowledged by,
Head of Accounting Department

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH..... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR..... vi

UCAPAN TERIMA KASIH vii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP xi

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK..... xii

ABSTRAK xiii

ABSTRACT xiv

DAFTAR ISI..... xv

DAFTAR TABEL xviii

DAFTAR GAMBAR..... xix

DAFTAR LAMPIRAN..... xx

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Perumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 8

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN 9

2.1 Tinjauan Pustaka..... 9

2.1.1 Teori Kontijensi 9

2.2 Kinerja Satuan Perangkat Daerah 10
2.3 Sinkronisasi Perencanaan..... 12
2.4 Partisipasi Anggaran 14
2.5 Kejelasan Sasaran Anggaran..... 15
2.6 Penelitian Terdahulu 16
2.7 Kerangka Pemikiran..... 18
2.8 Hipotesis 19

BAB III METODE PENELITIAN 23
3.1 Tipe penelitian 23
3.2 Jenis dan Pengumpuln Data 24
3.3 Populasi dan Sampel 24
3.3.1 Populasi 24
3.3.2 Sampel 25
3.4 Variabel Operasional Dan Definisi Operasional..... 27
3.4.1 Kinerja SKPD..... 27
3.4.2 Sinkronisasi Perencanaan 28
3.4.2 Partisipasi Anggaran..... 28
3.4.4 Kejelasan Sasaran Anggaran 29
3.5 Metode Analisis data..... 31
3.5.1 Metode Analisis Data 31
3.5.2 Pengujian Data 32
A. Uji Validitas 32
B. Uji Reliabilitas..... 32
3.5.3 Pengujian Hipotesis..... 33
A. Uji Signifikan Parsial 33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 34
4.1 Hasil Penelitian 34

4.1.1 Objek Penelitian 34
4.1.2 Gambaran Umum Responden 34
4.1.3 Uji Kualitas Data 36
4.1.3.1 Uji Validitas 36
4.1.3.2 Uji Reliabilitas 39
4.2 Hasil Penelitian 40
4.2.1 Analisis Deskriptif..... 40
4.2.1.1 Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran 40
4.2.1.2 Partisipasi Anggaran 43
4.2.1.3 Kejelasan Sasaran Anggaran..... 44
4.2.1.4 Kinerja SKPD Pemerintah Kota Palembang..... 46
4.3 Hasil Uji Normalitas……..47
4.4 Hasil Penelitian 49
4.4.1 Regresi Linear Berganda 49
4.4.2 Uji Parsial (Uji t) 50
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi..... 53
4.5 Pembahasan..... 54
4.5.1 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran..... 54
4.5.2 Partisipasi Anggaran Terhadap SKPD 56
4.5.3 Kejelasan Sasaran Anggaran 57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 58
5.1 Kesimpulan 58
5.2 Keterbatasan Penelitian..... 60
5.3 Saran ……60

DAFTAR PUSTAKA..... 62
LAMPIRAN..... 64

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar sampel 25

Tabel 3.2 Karakteristik Kuisioner 30

Tabel 4.1 Gabaran Responden 34

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas 36

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas 39

Tabel 4.4 Rangkuman Skor Variabel X1 40

Tabel 4.5 Rangkuman Skor Variabel X2 42

Tabel 4.6 Rangkuman Skor Variabel X3 44

Tabel 4.7 Rangkuman Skor Variabel Y 45

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas 47

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t) 49

Tabel 4.10Hasil Uji Koefisien Determinasi 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran..... 19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bagan Kerangka Pemikiran 72

Lampiran 2 Karakteristik Pemilihan Sampel 73

Lampiran 3Perusahaan Industri Jasa yang Menjadi Sampel Penelitian..... 74

Lampiran 4Laporan Keuangan Sampel Penelitian pada Perusahaan Industri Jasa 75

Lampiran 5Statistik Deskriptif Konservatisme Akuntansi *Political Cost, Debt Covenant, Bonus Plan,* Dan *Dividend Payout Ratio* 78

Lampiran 6Hasil Uji Normalitas (Sebelum Transformasi Data) 79

Lampiran 7Hasil Uji Normalitas (Setelah Transformasi Data) 80

Lampiran 8Hasil Uji Multikolinearitas 80

Lampiran 9Hasil Autokorelasi (Uji *Durbin-Watson*) 81

Lampiran10Hasil Uji Autokorelasi (*Run Test*) 81

Lampiran11 Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*) 82

Lampiran12 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 82

Lampiran 13HasilUji Koefisien Determinasi (R^2)..... 53

Lampiran 14 HasilUji Signifikansi Simultan (Statistik F)..... 54

Lampiran 15 HasilUji Signifikansi Parameter Individual (Statistik t)..... 55

Lampiran 16 HasilUji Ringkasan Hasil Uji t 57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan akuntansi sektor publik semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari perhatiaan banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui otonomi daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangga pemerintah daerah secara sendiri-sendiri termasuk didalamnya yang terpenting yaitu kewenangan yang lebih besar dalam pembuatan anggaran. Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Pasal 65 yang mengatur tentang Hak, Kewenangan, dan Kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Repulik Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan asas-asas pelayanan publik yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan

kewajiban. Sebagai salah satu implementasi dari asas-asas pelayanan publik pemerintah menyusun anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembangunan, jalan, pendidikan, dan lain sebagainya. Proses penganggaran menggunakan pendekatan kinerja yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan tentang pedoman dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), pembentukan RAPBD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama unit kerja tercantum dalam dokumen rencana kegiatan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Kewenangan yang diberikan harus diiringi dengan kinerja *stakeholder* atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baik. Kinerja organisasi adalah hasil akhirorganisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai kehendak pengguna jasa informasi, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya kinerja yang baik dalam pemerintahan daerah maka kewenangan yang telah diberikan akan terlaksana dengan baik pula.

Dalam hubungannya dengan kinerja, pentingnya mencapai sinkronisasi atau kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) nomor 25 tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja SKPD tidak terlepas dari partisipasi segala pihak yang ada dilingkungan SKPD. Kinerja SKPD dapat dinilai baik atau berkualitas apabila dapat melaksanakan kewenangan tersebut secara efektif, efisien, adil, dan merata. Kinerja SKPD juga dapat diukur dari perencanaan, pertanggungjawaban, penganggaran, pelaporan, dan pengawasan. Pada akhir masa anggaran setiap tahunnya, kinerja seluruh SKPD akandinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaranyang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Fenomena yang terjadi tentang kinerja tahun 2014 Penggunaan anggaran di Pemerintah Kota Padang ternyata masih lemah. Sejumlah SKPD tidak mampu merealisasikan pekerjaannya sesuai dengan taget yang ditetapkan. “ini membuktikan beberapa kinerja SKPD kota Padang dinilai buruk”. Faktor-faktor ini disebabkan karena pengelolaan yang tidak hati-hati, adanya pemborosan atas biaya yang tidak perlu, penggunaan sumber daya yang tidak memadai serta pencapaian target dan kebijakan yang tidak tepat. Seperti Dinas Pertanian Peternakan Kehutanan dan Perkebunan (Dispernakhutbun) pemerintah kota Padang, dana alokasi khusus untuk pertanian dan kehutanan tersisa sebanyak Rp155,9 juta selama tahun 2011 sampai tahun 2013.

Akibatnya banyak program dispernakhutbun tidak diselesaikan dengan baik. Lemahnya perencanaan kegiatan akibat para satuan kerja yang kurang siap dalam menyusun rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan banyak yang tertunda dari jadwal, dan penyerapan anggaran pun menjadi tidak optimal. Seyogianya kinerja SKPD dapat dilihat dari seberapa mampu mencapai target dan persentase

fisik dan keuangan program/kegiatan. Banyaknya anggaran yang hanya sebagian terserap akibat berbagai kendala yang dihadapi SKPD, seperti penerapan sistem pengendalian intern yang kurang baik dalam pelaksanaan program. Kendala lainnya yaitu kualitas sumber daya manusia, seperti masih banyaknya pegawai SKPD yang tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik sehingga program atau kegiatan yang dikerjakan tidak selesai dan terlambat dari waktu yang telah ditetapkan.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2016 pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terancam dicopot dari jabatan, apabila SKPD yang bersangkutan memiliki kinerja keuangan yang buruk, ditunjukkan dari laporan anggaran yang rendah.

Fenomena yng terjadi di kota Palembang adalah, adanya penurunan APBD Palembang dalam perubahan tahun 2015, yang mencapai sekitar Rp277 miliar dari APBD induk sebesar Rp3,1 Triliun, tidak dapat lepas dari dampak pencapaian retribusi tidak maksimal oleh SKPD yang berpengaruh pada PAD Kota Palembang. Beberapa SKPD mengajukan surat penurunan target pencapaian kontribusi PAD. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya SKPD yang tidak mampu merealisasikan target PAD yang sudah di tetapkan. Ini membuktikan beberapa kinerja SKPD Kota Palembang belum baik, kurangnya perencanaan dan penggunaan sumber daya yang memadai dapat menjadi faktor utama.

Kewo (2014) seperti yang dikutip Novia Idea Matondang (2015) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah

partisipasi anggaran.Partisipasi adalah konsep dimana bawahan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan sampai tingkat tertentu bersama atasannya (Robbins, 2002). Partisipasi anggaran sebagai proses keikutsertaan manajer pusat pertanggungjawaban dalam menyusun anggaran dan mempengaruhi target anggaran sebagai bagian utamatanggungjawabnya (Kenis). Dalam penyusunan anggaran pemerintah melibatkan banyak aparat pemerintah dalam hal ini seluruh bagian SKPD. Jika SKPD ikut serta dalam penyusunan anggaran maka hasil yang didapat akan lebih baik karena adanya tanggungjawab dari SKPD terhadap penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran dapat menjadi salah satu system pengendalian manajemen sehingga dapat tercapai tujuan SKPD terkait. Solichah (2013) menyatakan jika semakin sinkron dan konsisten dokumen perencanaan dan penganggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja SKPD. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin sinkron dokumen perencanaan dan penganggaran, maka akan semakin meningkatkan kinerja SKPD.

Keterlibatan SKPD dalam penyusunan anggaran akan berdampak pada kualitas hasilpenyusunan anggaran yang baik dan mencapai target anggaran. Manfaat partisipasianggaran dapat menimbulkan rasa kesatuan antara aparat pemerintah dengan atasan dan menimbulkan ide-ide baru atau inisiatif untuk menyusun anggaran.Hasil penelitian Rafika Anggraeni (2009) bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD.Tati Susilawati Sunarya (2013) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah (SKPD).Perbedaan hasil penelitian ini dapat terjadi karena faktor situasional yang terjadi berbeda antara

satu tempat dan tempat lainnya.Oleh karena itu, partisipasi anggaran masih harus diteliti lagi dengan variable yang lebih menguatkan pengaruh partisipasi terhadap penyusunan anggaran.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kinerja pemerintah adalah kejelasan sasaran anggaran.Salah satu karakteristik anggaran yaitu kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana anggaran yang telah ditetapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan awal. Selain itu, kejelasan anggaran adalah anggaran yang dibuat secara jelas dan efektif sehingga mudah dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab terhadap anggaran tersebut. Pada pemerintahan daerah sasaran atau disebut juga target adalah hasil yang diinginkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan (PermendagriNomor 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 43). Jika anggaran yang dibuat jelas sasarannya maka dapat mempermudah pembagian tanggungjawab anggaran dan memudahkan masing-masing aparat pemerintah (SKPD) mencapai kinerja yang lebih meningkat.Kewo (2013) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manejerial.

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti mengangkat masalah ini kedalam objek kajiannya dengan judul **“Pengaruh Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, Partisipasi Anggaran danKejelasan SasaranAnggaran Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah KotaPalembang”**.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan yang dikaji dalampenelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi perencanaan dan penganggaran mempengaruhi SKPD pemerintah kota Palembang ?
2. Bagaimana partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja SKPD Pemerintah kota Palembang ?
3. Bagaimana kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi kinerja SKPD Pemerintah kota Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian "Pengaruh sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kota Palembang" untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh sinkronisasi perencanaa dan penganggaran terhadap kinerja SKPD pemerintah Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja SKPD pemerintah Kota Palembang.
3. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan anggaran terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kota Palembang.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian “Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan, Partisipasi Anggaran dan KejelasanSasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kota Palembang” adalah secara Praktis sebagai informasi untuk organisasi perangkat daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Palembang dalam menyusun anggaran di masa yang akan datang agar pihak yang terkait dalam penyusunan anggaran dapat lebih berpartisipasi dalam penyusunan anggaran sehingga anggaran dapat dibuat sejaca jelas sesuai sasaran anggaran, juga sebagai informasi untuk meningkatkan kinerja SKPD di Pemerintah Kota Palembang agar lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Alim, M. N. (2006). *Sasaran dan Evaluasi Anggaran:Ketidakpastian Lingkungan dan Pengalaman Manajer Sebagai Variable Kontinjensi. Ekuitas. Vol 10 No.1. Halaman 21-41*.

Bangun, A. (2009). *Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi. Tesis.* medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Brownwll, P. (1982). *"Partcipation in the budgeting proses when it work and whenit doesn't". Journal of Accounting Leterature, Vol 1*.

D.R Cooper, d. s. (2011). Business research methods. *usa, mc graw-hill* .

Dafi Bahri, d. J. (2009). pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan anggaran, tujuan anggaran, dan evaluasi terhadap kinerja aparat pemerintah. *jurnal telaah dan riset akuntansi. vol 2 no 1* , 44-53.

Kenis, I. (1979). the effect of budgetary and accountability in local government. *australian journal of public administration. vol 60 (2)* , 35-43.

Kewo, C. (2014). the effect of prticipative budgeting, budget goal clarity, and internal control implementasion on managerial performance. *research journal of finance and accounting vol 5 (12)* , 81-87.

M, M. F. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.

M. Mahsun, F. S. (2011). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga.* Yogyakarta: BPFE.

Muhammad, G. (2001). *Pengaruh Interaksi Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetris, dan Penekanan Anggaran terhadap Budget Slack. Tesis.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Nova Idea Matondang, H. B. (2015). pengaruh sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, partisipasi anggran, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja SKPD pada pemerinth kabupaten aceh utara. *jurnal magister akuntansi vol 4* , 36-45.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 13. (2006).

Peraturan menteri dalam negeri nomor 59. (2007).

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 38. (2007).

Putra, D. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anffaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Skripsi.* Padang: Universitas Negeri Padang.

Putra, D. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi*

Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.

Rasyid, A. (2010). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tesis.* Papua: Universitas Yapis Papua.

Rejeki, M. E. (2012). pengruh komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja material, lantip vol 2 no 1.

Robbins, S. P. (2015). *perilaku organisasi.* jakarta: salemba empat.

Solichah, S. (2013). *Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran di Kabupaten Tulungagung (Studi Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Tahun 2010-2012). Skripsi.* malang: universitas brawijaya.

Sri Rustiyaningsih, d. I. (2014). faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. *widya warta* , vol 2.

Undang-Udang Republik Indonesia nomor 25. (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32. (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 . (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38. (2007).